



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN LAPANGAN KOMISI IX DPR RI  
KE PT. (PERSERO) ANGKASA PURA I  
KAMIS, 8 MEI 2008**

Kunjungan Lapangan Komisi IX DPR RI ke PT. (Persero) Angkasa Pura I menindaklanjuti surat dari DPP Serikat Pekerja PT. (Persero) Angkasa Pura I nomor SP.AP.I.042/DPP/IV/2008 tanggal 28 April 2008 perihal pemberitahuan rencana mogok kerja.

Kunjungan Lapangan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2008 Pukul 13.00 WIB, Kota Baru Bandar Kemayoran, Blok B-12 Kav.2 Jakarta Pusat, didampingi Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Depnakertrans RI Bapak Drs. I Gusti Made Arke, M.Si dan Direktur PHI Bapak Sugandi

Anggota Komisi IX DPR RI yang mengikuti Kunjungan Lapangan sebagai berikut :

NO.	N A M A	NO. ANGG	FRAKSI	JABATAN
1.	dr. RIBKA TJIPTANING	322	PDIP	Ketua
2.	TAUFAN TAMPUBOLON, SE, MM	303	PDIP	Anggota
3.	Hj. ELVA HARTATI, S.Ip., MM	308	PDIP	Anggota
4.	dr. GOENAWAN SLAMET, SpB	327	PDIP	Anggota
5.	K.H. AMIN BUNYAMIN, Lc	40	PPP	Anggota
6.	ANSHORY SIREGAR, Lc	243	PKS	Anggota
7.	dr. KASMAWATI TAHIR Z. BASALAMAH	297	PBR	Anggota
8.	Drs. ARISMAN ZAGOTO	409	PDS	Anggota

**POKOK-POKOK PEMBICARAAN :**

Tuntutan DPP Serikat Pekerja PT. Angkasa Pura I antara lain :

- ◆ Masalah gaji pokok sesuai perjanjian kerja bersama;
- ◆ Tunjangan Hari Tua (THT) sesuai Perjanjian Kesepakatan Bersama (PKB);
- ◆ Masalah kesehatan pensiun;
- ◆ Masalah penghentian tindakan intimidasi dan kriminalisasi yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura I kepada pengurus dan anggota serikat pekerja PT. Angkasa Pura I.

Penjelasan Direktur Utama PT. Angkasa Pura I :

- ◆ Penyelesaian hubungan industrial telah dilaksanakan melalui beberapa kali pertemuan, dan setiap pertemuan selalu menghasilkan kesepakatan, mediasi telah dilakukan dan difasilitasi oleh Menakertrans dan Meneg BUMN namun hal ini belum menyelesaikan permasalahan;
- ◆ Pihak manajemen PT. (Persero) Angkasa Pura I bersedia untuk difasilitasi oleh Dirjen PPK dan PHI bahkan dengan melibatkan konsultan.

Penjelasan Dirjen PPK dan PHI Depnakertrans RI :

- ◆ Bahwa kronologis permasalahan sudah jelas, namun tidak ada transparansi;
- ◆ Pertemuan yang dilaksanakan tanggal 6 Maret 2008 dan telah menghasilkan kesepakatan tidak berjalan dan Dirjen PPK menyarankan kesepakatan-kesepakatan yang ada dan menjadi kewenangan Direksi maupun pemegang saham harus segera diselesaikan. Dirjen PPK juga menghimbau agar pihak Direktur/Manajemen PT. Angkasa Pura I dapat mendesak pemegang saham untuk memberikan kepastian kepada para pekerja, agar pihak Serikat Pekerja dapat berpikir jernih.

Tanggapan Pimpinan Komisi IX DPR RI :

- ◆ Meminta agar Dirjen PPK dan PHI memfasilitasi permasalahan dan laporan segera disampaikan kepada Pimpinan Komisi IX DPR RI paling lama 2 (dua) minggu setelah pertemuan ini;
- ◆ Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan, maka Komisi IX DPR RI akan melakukan Rapat Kerja Gabungan dengan Menaker, Menteri Perhubungan dan Meneg BUMN.

Jakarta, 12 Mei 2008

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI  
K E T U A,



dr. RIBKA TJIPTANING